

## **PERANAN *FASHION* DAN PAKAIAN SEBAGAI KOMUNIKASI IDENTITAS SOSIAL**

**Netty Lisdiantini**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, nettylisdiantini@gmail.com

**Subiyantoro**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, subiyantoro@pnm.ac.id

**Yosi Afandi**

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, afandi.yosi@gmail.com

### ***Abstract***

*As one of the clearest markers of many outward appearance markers, clothing is a distinctive individual and group identity. Therefore, even though being worn in a single organization, the symbol of uniform can have its own identity and tradition. Fashion and clothing are ways that individuals use to determine themselves as individuals and express some of their uniqueness. As a form of individualistic expression, there are values in fashion that are promoted or communicated through what is displayed. Relating this concept to dress policies for students of the Madiun State Polytechnic Business Administration Study Program on certain days. In terms of context, the evaluation results using the CIPP evaluation model (context, input, process, product) shows that, the implementation of this policy supports a character that is more disciplined, obedient and orderly in regulations, creates authority through habituation and can reduce economic inequality and establish a sense of belonging towards the Study Program institutions and a sense of unity, as an identity or differentiation with other Study Program students. With regard to input, although there are various reactions to the implementation of the policy, there is no direct rejection. From the prospective of process, the means used are announcements posted on the Announcement Board of the Department and policy writing in the Guidebook. Whereas in terms of product, the changes that occur after students wear uniforms are to be more orderly, more disciplined, more controlled in acting, as well as feeling more authoritative, and can be emulated.*

**Keywords:** *dress policy, social identity, orderly, discipline*

### **Abstrak**

Sebagai salah satu penanda yang paling jelas dari sekian banyak penanda penampilan luar, pakaian merupakan pembeda secara perorangan maupun identitas kelompok tertentu. Artinya bahwa, meskipun berada di dalam satu wadah suatu organisasi, simbol pakaian seragam dapat memiliki identitas dan tradisi sendiri. *Fashion* dan pakaian merupakan cara yang digunakan individu untuk membedakan dirinya sendiri sebagai individu dan menyatakan beberapa keunikannya. Sebagai suatu bentuk dari ekspresi individualistik, di dalam sebuah *fashion* terdapat nilai-nilai yang ingin dipromosikan atau dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Sebagaimana kebijakan penggunaan seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Dari hasil evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) menunjukkan bahwa dari sisi *context*, implementasi kebijakan tersebut mampu mendorong karakter yang lebih disiplin, taat, dan tertib pada peraturan, membentuk kewibawaan melalui pembiasaan dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi serta membentuk *sense of belonging* terhadap institusi Program Studi dan *sense of unity*, sebagai identitas atau pembeda dengan mahasiswa Program Studi lain. Sedang dari sisi *input*, meskipun terdapat beragam reaksi atas implementasi kebijakan tersebut, namun tidak ada penolakan secara langsung. Kemudian dari sisi *process*, sarana yang digunakan adalah pengumuman yang ditempel pada Papan Pengumuman Jurusan dan tulisan di Buku Pedoman. Dari sisi *product*, perubahan yang terjadi setelah mahasiswa menggunakan seragam adalah menjadi lebih tertib, lebih disiplin, lebih terkontrol dalam bertindak, merasa lebih berwibawa, dan dapat diteladani.

**Kata kunci:** kebijakan berbusana, identitas sosial, tertib, disiplin

## **PENDAHULUAN**

Seragam merupakan ekspresi *fashion* yang peransosial. Para akademisi terlebih di Indonesia, tentu akhir-akhir ini meningkat penggunaannya memiliki aturan berbusana yang sudah diatur oleh setiap pada organisasi formal juga informal. Penggunaan instansi dan lembaganya seperti pada program studi seragam dianggap mampu merangkum peran- Administrasi Bisnis yang telah menerapkan

kebijakannya tentang berbusana. Program studi Administrasi Bisnis adalah satu-satunya program studi di Politeknik Negeri Madiun yang memiliki aturan seragam pada hari tertentu untuk mahasiswanya.

Program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun memiliki visi menjadikan program studi Administrasi Bisnis sebagai pusat pengembangan pendidikan vokasional di bidang Administrasi Bisnis yang mampu melahirkan sumber manusia manusia yang unggul, mandiri, bermoral, inovatif dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan program studi Administrasi Bisnis untuk mewujudkan visi tersebut adalah keluarnya kebijakan Ketua Jurusan tentang penggunaan seragam dan kebijakan berbusana kantor pada saat kegiatan belajar mengajar.

Dalam hal berbusana hampir semua mahasiswa mengenakan gaya aksesories yang berbeda, mulai dari scarf, warna jilbab bagi perempuan, sepatu, dan aksesoris-aksesoris lain yang mereka pakai saat itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan fashion marak di kalangan anak muda apalagi di lingkungan mahasiswa. Hal ini dapat kita lihat pemandangan dalam kehidupan kampus seperti yang sudah diterangkan, dengan mudah dapat kita temui berbagai macam model pakaian yang dikenakan mahasiswa. Sehingga terkadang mahasiswa merasa terkungkung dengan adanya kebijakan berbusana yang diterapkan.

Namun di lain pihak mahasiswa juga sadar bahwa ada hal baik dengan adanya kebijakan berbusana tersebut. Menjadi sangat menarik untuk dikaji. Kampus menjadi ruang sosial multi-identitas dalam pandangan modernitas, di mana pergulatan dan perebutan makna terjadi untuk merebut dominasi atas cara berpakaian.

Mahasiswa sebagai kaum yang sedang gemar-gemarnya mengolah *fashion* mereka namun mereka diikat oleh aturan kampus dalam berbusana bagaimana mereka mensinkronkan *fashion* dengan kebijakan berbusana menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai implementasi kebijakan berbusana sebagai komunikasi identitas sosial di kalangan mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun.

## **KAJIAN TEORI**

### **Implementasi**

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Menurut Husaini Usman (2006), terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*)

2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.  
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.

3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.  
(dalam Tangkilisan, 2003:5).

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas

maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **Identitas Sosial**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas dan kata sosial sebagai berikut : identitas adalah: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri”. Sedangkan kata “sosial” didefinisikan sebagai yang “berkenaan dengan masyarakat”. Dengan demikian kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Identitas menunjukkan cara-cara di mana individu dan kolektivitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan dengan individu dan kolektivitas lain.

Turner dan Tajfel (dalam Budi Susetyo;2007) mengamati bahwa orang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok di mana mereka merasa lebih nyaman atau membuat kelompok di mana mereka sedang tergabung sebagai tempat yang lebih menyenangkan. Hal ini mengartikan bahwa fungsi identitas sosial seseorang atau kelompok orang adalah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, efektif dan dialektif.

Petunjuk artifaktual meliputi segala macam penampilan (*appearance*) sejak potongantubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, badge, dan atribut-atribut lainnya. Randal P. Harrison menyebutkan *Artifactual Codes* ini seperti *manipulation of dress*, kosmetik(make-up), perlengkapan, obyek seni, simbol status, arsitektur, dan sebagainya. Sehingga identitas sosial juga membantu seseorang untuk mengenali dirinya darimana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Hal ini kemudian membentuk seseorang menjadi agen sosial, artinya menandakan bahwa seseorang tidak sendirian, tetapi ada orang di sekelilingnya, dengan dukungan dan solidaritas dari pihak lain dan kelompoknya sendiri.

### **Pakaian dan Seragam**

Pakaian merupakan media komunikasi yang penting. Pesan yang dibawa pakaian bergantung pada sejumlah variabel, seperti latar belakang budaya, pengalaman, dan lainnya. Pakaian adalah, “Ekspresi dan identitas seseorang karena ketika memilih pakaian di toko maupun di rumah berarti mendefinisikan dan mendeskripsikan diri sendiri” (Laurie dalam Nordhlot, 2005: 1). Nordhlot

menjelaskan bahwa pengertian ini tidak berlaku bagi seragam yang dimaksudkan untuk mengurangi individualitas sebanyak mungkin guna mencapai identitas kolektif.

Sukastomo (2004) berpendapat bahwa seragam memiliki banyak fungsi diantaranya adalah, menciptakan kedisiplinan. Pemakaian seragam yang ditentukan harinya, dapat menciptakan perasaan dan semangat disiplin. Membentuk kerapian, menampilkan keindahan. Kerapian akan memunculkan keindahan yang enak dipandang. Tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara anggotanya dan sebagai kendali. Orang yang memakai seragam secara otomatis dirinya akan terkendali karena mencerminkan sebuah institusi dari seragam tersebut (Budiyati, 2010). Secara sederhana seragam memiliki fungsi yaitu menyatukan keberagaman pelajar dan sebagai bentuk kedisiplinan pelajar (Budiyanti, 2010).

Kefgen dan Specht menyatakan, ada tiga dimensi informasi tentang individu yang disebabkan oleh pakaian:

1. Pakaian melambangkan dan mengkomunikasikan informasi tentang emosi komunikator. Contoh Gald Rags (pakaian ceria), Widow's Weed (pakaian berkabung). Pakaian juga digunakan untuk membangkitkan emosi massa dalam hal patriotisme dan nasionalisme, seperti baju hijau PPP, baju kuning Golkar, baju merah PDIP.
2. Pakaian juga berpengaruh terhadap tingkah laku pemakainya sebagaimana tingkah laku orang yang menanggapinya. Seorang penyanyi rock identik dengan pakaian yang asal-asalan dan ditafsirkan bahwa orang tersebut brutal. Polisi yang tidak berseragam akan kehilangan identifikasi sosial dan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan seragam tertentu, orang telah menyerahkan haknya sebagai individu untuk bertindak bebas, dan selanjutnya ia harus menyesuaikan dan tunduk pada aturan kelompoknya.
3. Pakaian berfungsi untuk membedakan seseorang dengan orang lain, atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dari pakaian kita bisa mengenali seseorang apakah dia dari kelompok musik rock, seorang murid SMU. Zweig mengemukakan, kelompok umur yang berbeda akan membedakan pula kebiasaan mereka dalam hal berpakaian. Anak-anak muda biasanya memakai pakaian yang bervariasi dan mencolok, sedangkan orang tua biasanya memakai pakaian yang sederhana dan kuno.

### **Evaluasi Program**

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan. Perlu adanya evaluasi program untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai,



dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Evaluasi program dengan baik dikemukakan oleh Arikunto & Jabar (2004) dalam sebuah definisi, "Evaluasi program adalah upaya untuk tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan caramengetahui efektivitas masing-masing komponennya".

Menurut Arikunto & Safruddin (2008) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu, menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarkan program (melaksanakan program di tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu) (Widoyoko, 2009).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun.

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap satu kesatuan sistem berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari suatu kasus.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Interview.**

Cara ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan berbusana pada program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Dan responden tentang *interview* ditujukan pada informasi mengenai perlu tidaknya menghentikan kebijakan, merevisi kebijakan, melanjutkan kebijakan. *Interview* yang dilakukan bersifat interaktif dan komunikasi yang dilakukan secara verbal dalam konteks pembicaraan secara langsung dan datayang terkumpul digunakan sebagai bahan diskusi selanjutnya. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* mendalam, dimana responden berdiskusi secara bebas. Wawancara mendalam dapat dilakukan melalui telepon (Ardianto, 2010;61). *Interview* dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan menggunakan perekaman menggunakan *handphone*, serta wawancara melalui

aplikasi whatsapp dan juga telepon.

### **2. Dokumentasi.**

Cara untuk mencari data melalui catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk memperoleh data tentang kebijakan, gambaran umum, dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkup program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun.

### **3. Observasi**

Cara yang digunakan untuk menghimpun data dengan mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang akan dijadikan sasaran pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, menurut Spradley yang dikutip oleh Sugiono adalah situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat) di mana interaksi sosial sedang berlangsung, *actor* (pelaku) yang merupakan orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dan *activities* (aktifitas) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam situasi sosial yang sedang berlangsung..

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2007), yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan responden. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

#### **b. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

#### **c. Display Data**

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

#### **d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan**

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Pemeriksaan atau pengujian kesimpulan (*drawing and verifying*), yaitu mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari data display yang telah disusun.

## **PEMBAHASAN**

Sebagai satu-satunya program studi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun yang menerapkan kebijakan berbusana dalam upaya

identitas sosial, pihak Jurusan/Program Studi Administrasi Bisnis berupaya memberikan kesadaran kepada mahasiswa bahwa penerapan seragam pada hari tertentu dapat memberikan identitas yang positif di mata kelompok lain. Disamping itu dengan adanya suatu identitas akan menumbuhkan suatu struktur sosial tertentu yang memang diinginkan oleh beberapa orang.

Secara tidak langsung, implementasi kebijakan berbusana pada dasarnya akan membentuk karakter disiplin bagi mahasiswa, membentuk kerapian, dan menampakkan keindahan. Lebih lanjut, kerapian akan memunculkan keindahan yang enak dipandang mata serta mendorong terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para anggota sekaligus sebagai kendali dalam perilaku.

Pada dasarnya implikasi dari implementasi dari sebuah kebijakan bukan hanya sekedar output, namun dapat memberikan outcome yang diinginkan. Sebagai alat untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan yang diterapkan tersebut, maka perlu mengetahui sejauh mana bentuk pelaksanaannya. Setelah itu baru dapat melihat faktor-faktor yang berpengaruh selama penerapan kebijakan tersebut berlangsung. Dari situlah bisa mengukur sejauh mana kebijakan itu berhasil ataukah sebaliknya yaitu tidak berhasil diterapkan di tempat tersebut.

Diawali dengan tahap sosialisasi pada saat penerimaan mahasiswa baru, sebagaimana disampaikan Ketua Jurusan Administrasi Bisnis bahwa sosialisasi kebijakan berbusana selama ini dilakukan dengan cara memberitahukan di awal saat pengarahan penerimaan mahasiswa baru pada Jurusan Administrasi Bisnis. Tahap selanjutnya pada saat telah masuk masa perkuliahan, pihak Jurusan dan Program Studi membuat rancangan kebijakan yang kemudian didiskusikan dengan perwakilan mahasiswa. Hasil dari diskusi tersebut dituangkan ke dalam suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh semua ketua kelas kemudian disosialisasikan sebagai sebuah kebijakan.

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut didukung oleh para dosen dengan memberikan teladan dalam berbusana kerja yang baik dan selalu mengingatkan kepada mahasiswa akan pentingnya berbusana 'office style' dalam rangka mempersiapkan para mahasiswa ketika terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Keteladanan dalam berbusana dari para dosen berdampak positif kepada para mahasiswa dalam memahami kebijakan yang diberlakukan.

Kondisi cara berpakaian mahasiswa Administrasi Bisnis tidak semuanya mencerminkan sebagai calon pekerja 'kantoran'. Mahasiswa mengenakan busana secara serampangan, memakai hijab sekenanya, celana jeans pensil, berkaos, hingga cat rambut dengan warna yang kurang baik. Hal ini

yang melatarbelakangi perlunya diambil kebijakan tentang tata tertib berbusana kepada mahasiswa untuk memakai seragam pada hari-hari tertentu.

Melalui seragam diharapkan dapat membentuk karakter para mahasiswa menjadi lebih disiplin, taat dan tertib pada peraturan, serta membentuk kewibawaan melalui pembiasaan. Disamping itu, dampak kebijakan juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, membentuk sense of belonging dan sense of unity, yakni sebagai identitas atau pembeda dengan mahasiswa program studi lain, nampak lebih rapi, dan dapat menjadi filter atas perilaku mahasiswa.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rachman (2011:32) bahwa setidaknya terdapat 13 watak yang perlu dikembangkan di Indonesia, salah satunya adalah disiplin. Namun menurut Cross Cultural Understanding, dalam kaitan dengan kedisiplinan, masyarakat Indonesia masih memiliki nilai yang rendah. Hilangnya kedisiplinan pada masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang harus dicarikan solusinya.

Kebijakan pada Program Studi Administrasi Bisnis yang diberlakukan kepada mahasiswa untuk memakai seragam pada hari-hari tertentu pada dasarnya merupakan salah satu solusi terkait dengan rendahnya nilai disiplin mahasiswa. Sesuai teori Hidayatullah (2010) tentang strategi pendidikan karakter, dinyatakan bahwa salah satu cara pembentukan karakter adalah dengan penegakan kedisiplinan melalui pembuatan aturan. Kebijakan penggunaan seragam dapat mengarahkan para mahasiswa untuk memiliki kepribadian yang taat pada peraturan.

Disamping dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, penggunaan seragam dapat menimbulkan rasa bangga dan sense of belonging terhadap Jurusan Administrasi Bisnis, karena mahasiswa Merasa menjadi bagian di dalamnya. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan oleh Brusna & Rockquemore (1998) bahwa, "Advocates believes that uniform increase student learning by increasing positive attitudes towards school and enhancing the learning environment by reducing distractions related to clothing or dress, and by developing a sense of belonging..." (Strom, Peterson & Miler, 2003:4).

Penggunaan pakaian seragam dapat menunjukkan ciri khas atau identitas suatu kelompok dengan kelompok lain. Seragam yang dikenakan mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis pada hari Senin dan Selasa misalnya, merupakan pembeda dengan mahasiswa program studi lain, bahkan satu-satunya program studi yang mahasiswanya menggunakan seragam pada hari itu.

Identitas berupa seragam yang dikenakan para mahasiswa secara tidak langsung akan menjadi kendali atau filter agar tidak berperilaku buruk. Penggunaan pakaian seragam dapat mendorong untuk menjaga

perilaku, setidaknya ketika bertemu dengan mahasiswa program studi lain dapat menimbulkan rasa malu apabila sampai berperilaku buruk.

Pada satu sisi, keterlibatan para pelaksana dalam merumuskan strategi implementasi merupakan salah satu kunci kesuksesan pencapaian suatu program. Salah satu faktor yang mempengaruhi konflik tujuan implementasi kebijakan adalah sejauhmana para pejabat bawahan (implementators) berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan.

Pada sisi lain, pembahasan belum sampai pada tahap penyusunan strategi yang harus dilakukan jurusan dan program studi untuk menyukseskan kebijakan yang telah dibuat. Jurusan hanya sebatas himbauan pada jenjang organisasi di bawahnya, belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Padahal, kejelasan mengenai implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting.

Dalam realita, aturan penggunaan pakaian yang seragam tidak menenggelamkan gairah mahasiswa dalam fashion. Para mahasiswa namak tetap menerapkan fashion yang disukai ketika berseragam, meskipun pada awalnya nampak terkejut terhadap kebijakan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya para mahasiswa dapat memahami mengapa harus mengenakan seragam pada hari-hari tertentu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari sisi *context*, pengambilan kebijakan berbusana dilatarbelakangi oleh kondisi cara berpakaian para Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis yang belum totalitas mencerminkan calon tenaga kerja 'kantoran' yang siap pakai. Implementasi kebijakan yang berupa kewajiban bagi Mahasiswa untuk menggunakan seragam pada hari-hari tertentu dimaksudkan untuk membentuk karakter yang lebih berdisiplin, taat dan tertib pada peraturan, membentuk kewibawaan melalui pembiasaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, membentuk *sense of belonging* terhadap institusi Program Studi serta *sense of unity*, identitas atau pembeda dengan mahasiswa program studi lain. Pakaian seragam yang dikenakan para Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis menunjukkan identitas dan tradisi di Program Studi Administrasi Bisnis.

Dilihat dari sisi *input*, berbagai reaksi yang muncul tidak ada yang mengindikasikan penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan. Sedang dari sisi *process*, sarana yang digunakan adalah pengumuman yang ditempel di Papan Pengumuman Jurusan Administrasi Bisnis dan tulisan di Buku Pedoman. Meskipun dampaknya tidak begitu signifikan, hambatan yang terjadi selama berlangsungnya proses pelaksanaan kebijakan

berbusana di Program Studi Administrasi Bisnis tersebut adalah masih kurangnya kepedulian dari beberapa dosen dan kurangnya memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan dalam sosialisasi.

Kemudian dari sisi *product*, perubahan yang terjadi setelah mahasiswa menggunakan seragam ditunjukkan oleh perilaku yang lebih tertib, lebih disiplin, lebih terkontrol dalam bertindak dan merasa lebih berwibawa serta dapat diteladani.

### **Saran**

Melihat perkembangan yang ada, pada dasarnya masih perlu dilakukan sosialisasi yang intensif. Tindakan tegas juga perlu dilakukan, agar mahasiswa dapat berperilaku lebih disiplin. Begitu pula para pegawai di lingkungan Program Studi Administrasi Bisnis, dosen dan tenaga kependidikan, turut memberi teladan dengan berbusana sesuai dengan profesinya dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kebijakan berbusana yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar. 2008
- Ardianto, Elvinaro. Metode Penelitian untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: PT Simbiosis Rekatama. 2010.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan. Bumi Aksara:Jakarta. 2004.
- Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Bardach, Eugene. The Implementation Game. Cambridge: MIT Press. 1977.
- Budiati, A.C., Liestyasari, S.I., & Nugraha, Y.H.T. Simbolisme Dunia Pendidikan (Studi Semiotik tentang Makna Seragam Sekolah dan Implikasinya bagi Pendidikan Berkarakter di Kota Surakarta). Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan. FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Bungin, H.M Burhan. Sosiologi Komunikasi. Jakarta : Kencana, 2007
- Direktorat Ketenagaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional. Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. 2010.
- Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Eko Putro Widoyoko,S. Evaluasi Program

- Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Fredrickson dan Hart. Kebijakan Publik dan Formulasi Jakarta: Sinar Harapan. 2003.
- Hasanah, A. (2009). Pendidikan Berbasis Karakter. Diperoleh 9 April 2012, dari <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/pendidikanberbasis-karakter>
- Hidayatullah, Furqon, Pendidikan Karakter; Membangun Peradaban Bangsa, Surakarta: Yuma Pustaka,. 2010.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press. 1986.
- Husaini Usman, Manajemen,Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara,Jakarta, 2006.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses September 2018]
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, Implementation and PublicPolicy. USA:Scott Foresman and Company. 1983.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2009.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial.Jakarta: Gadjah Mada University. 2003.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002
- Nordholt, H.S (Ed). Outward Appearances (Trend, Identitas, Kepentingan). Terj. M.Imam Aziz.Yogyakarta: Lkis. 2005.
- Parwito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara. 2007
- Poerwandari, E.K. Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2007.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta. 2012.
- Rahman, Masykur Arif. Pentingnya Disiplin Belajar. Jakarta : Rineka Cipta. 2011.
- Randall P. Harrison The Cartoon: Communication to the Quick (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1981). Book Review.
- Richard Jenkins, Social Identity, Third Edition, (United Kingdom: Routledge, 2008.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:CV. Alfabeta. 2005.
- Sulastomo, Managemen Kesehatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. 2003.
- Widoyoko S, Eko Putro. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita. 2008.